

OMBUDSMAN RI PAPUA BARAT DAN RRI FAKFAK SEPAKAT JALIN KERJA SAMA UNTUK PENGUATAN LAYANAN PUBLIK

Senin, 29 September 2025 - papbar

Fakfak - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menjalin kesepakatan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Stasiun Fakfak dalam rangka penguatan kualitas pelayanan publik dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Pertemuan berlangsung di Kantor RRI Fakfak pada Jumat (26/09/2025).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, menyatakan bahwa sinergi antara Ombudsman dan media, khususnya RRI, merupakan langkah strategis untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memberikan edukasi publik tentang hak dan kewajiban dalam layanan publik.

"RRI sebagai media publik memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang sehat, mendorong keterbukaan, dan menjaga nilai-nilai budaya lokal. Kolaborasi ini diharapkan turut memperkuat pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik di daerah, termasuk di Fakfak," ujar Atkana.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Fakfak, James Stephen Jahawadan, menyambut positif rencana kerja sama ini dan menyampaikan komitmen RRI Fakfak untuk turut berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

"Kami berterima kasih atas kunjungan dari Ombudsman Papua Barat. RRI siap menjadi mitra strategis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan publik, dan memperkuat literasi layanan publik," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk segera menindaklanjuti pertemuan ini dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan mengatur bentuk sinergi ke depan, termasuk penyiaran program edukatif dan penyampaian pengaduan masyarakat melalui kanal media.

Selain membahas kerja sama kelembagaan, pertemuan turut membahas kegiatan yang sedang berlangsung di RRI Fakfak, termasuk Audisi Bintang Radio yang menggandeng pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kerja sama ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat jejaring pengawasan layanan publik dan menjangkau masyarakat luas melalui pendekatan informasi yang humanis dan berbasis lokalitas. (ORI-Papbar)